

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press
- Agustinus. “Saksi Mahkota dalam RUU Hukum Acara Pidana”. *Jurnal Hukum Militer*. Vol. 1. No. 7. Oktober 2013. <http://library.stik-ptik.ac.id/file?file=digital/50119-JHM1-014.pdf#>
- Aulia Nova, et al. “Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum”. *Journal of Lex Generalis (JLG)*. Vol. 1. No. 6. Nopember 2020. <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/236/251>
- Ayu Nyoman. 2020. “Bahasa Satire dalam Meme Media Sosial”. *Pustaka: Jurnal Ilmu – Ilmu Budaya*. Vol. 20. No. 1. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1723018&val=18606&title=Bahasa%20Satire%20dalam%20Meme%20Media%20Sosial>
- BBC News Indonesia. “Mensos Juliari Batubara jadi Tersangka Korupsi Bansos Covid-19 ancaman hukuman mati bakal menanti?”. 11 April 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360>
- Chomarajah Siti. 2019. *Integritas Hakim dalam Menghasilkan Putusan Tindak Pidana Korupsi: Persembahan untuk Maluku*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=WeCNDwAAQBAJ&oi=fnd&p=PR6&dq=Integritas+Hakim+dalam+Menghasilkan+Putusan+Tindak+Pidana+Korupsi:+Persembahan+untuk+Maluku&ots=noWjSMN1P&sig=vvosM2wT8USMDxefBIZsQxU6THI&redir_esc=y#v=onepage&q=Integritas%20Hakim%20dalam%20Menghasilkan%20Putusan%20Tindak%20Pidana%20Korupsi%3A%20Persembahan%20untuk%20Maluku&f=false
- CNBC Indonesia. 2021, “Dari Mana Anggaran Stimulus Rp 405 T untuk Covid-19 Didapat?”. 01 April 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200401100838-4-148958/dari-mana-anggaran-stimulus-rp-405-t-untuk-covid-19-didapat>
- Danil Elwi. 2016. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers
- Dasuki Nuddin dan Idris Wasahua. “Tinjauan Hukum terhadap Putusan yang Menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.SIM”. Tanggal 23 April 2015. *JCA of LAW*. Vol.1. No. 1. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/7/7>

- Diana Evi dan Baiq Lily. 2022. "Ketimpangan Sosial dan Bencana: Suatu Analisis Sosiologis terhadap Dampak Bencana Berbasis Kelas Sosial". *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*. Volume 4. Issue 1
- Elsye Rosmery. "Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penanganan Covid-19". *Jurnal Konstituen*. Vol. 2. No. 2. Agustus 2020. hlm. 114
- Elwina Marcella. 2018. *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*. Vol. 21. No. 1
- Fitrihabi Nuraida, et al. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal-Usul Perkawinan". *Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 7. No. 2. Desember 2021. <https://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article/view/1448/978>
- Floranta Firman. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Volume 12. Nomor 2. Juni 2015. <https://jurnal.konstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1222/61>
- Rommy Haryono. 2019. "Mewujudkan Aspek Keadilan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata". *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*. Vol. 5. No. 1. Mei 2019. hlm. 94. <https://repository.ubaya.ac.id/35512/1/Rommy%20Haryono%20Djojo%20rahardjo%20MEWUJUDKAN%20ASPEK%20KEADILAN%20DALAM%20PUTUSAN%20HAKIM.pdf>
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 310*
- Hukom Alexander, et, al. "Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Jaksa Menurut Pasal 184 KUHAP dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 340 KUHP". *Lex Administratum*. Vol. IX/No. 3/Apr/2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/administratum/article/view/3215/31407>
- Indianto Dimas, Nyoman Serikat, Pujiyono. 2021. "Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Semarang)". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 10. Nomor 1. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/30017>
- Indriati Ety. 2013. *Pola dan Akar Korupsi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

- Judiolrs Artji. 2014. "Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 12 No. 1. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/340/392>
- Kawengian Tiovany. "Peranan Keterangan Saksi sebagai Salah Satu Bukti dalam Proses Pidana menurut KUHAP". *Lex Privatum*. Vol. IV. No. 4. April 2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11990>
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/135718/keppres-no-12-tahun-2020>
- Laksono Fajar dan Soeroso. 2014. "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. volume 11. Nomor 1. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1114/10>
- Mardihana Novi. 2020. "Limitatif Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 8. Nomor 9. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1774775&val=907&title=LIMITATIF%20KEWENANGAN%20JAKSA%20PENUNTUT%20UMUM%20DALAM%20TINDAK%20PIDANA%20KORUPSI>
- Mawey Andrew. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan hukum". *Lex Crimen*. Vol. V/No. 2/Feb/2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/11120/10710>
- Mohammad Pan. 2009. "Teori Keadilan John Rawls". *Jurnal Konstitusi*. Volume 6. nomor 1. April 2009. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2847573
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- Musniasih Yuniati. "Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Daya Beli Masyarakat NTB". *Mpu Procuratio: Jurnal Penelitian Manajemen*. Volume 2. No. 2. Desember 2020. <https://www.scribd.com/document/539718801/Judul-1-Copy>
- Noviyanti Ririn. "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 20(2). Juli 2020. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/1010/724>
- Nugroho Bastianto. "Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP". *Yuridika*. Volume 32. No.1. Januari 2017. https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4780/pdf_1
- Paramita Yessy. 2015. "Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Lex Crimen*. Vol. IV. Nomor 2.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/7780/7343>

Pekan Ekklesia. "Kajian Hukum Terhadap Wewenang Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 14 Huruf D KUHP". *Lex Crimen*. Vol.VII/No.9/Nov/2019.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/22577/22268>

Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee925eada6bb328002313133363233.html>

Prayogo Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13 No. 02. Juni 2016. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/pdf>

Rahmatullah. 2021. "Penegakkan Hukum dalam Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 dan Kaitannya Dengan HAM". *Ganessa Civic Education Journal*. Volume 3 Issue.

<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2201239>

Rahmansyah Wildan. 2020. "Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia". *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*. Vol. II. No. 1. 2020.

<https://jurnal.pkstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/995/518>

Ratna Wuri. "Faktor Faktor Risiko yang Berhubungan dengan Covid-19: Literature Review". *Jurnal untuk Masyarakat Sehat (JUKMAS)*. Vol. 4. No. 2. Oktober 2020.

<https://ejournal.urindo.ac.id/index.php/jukmas/article/view/1015/696>

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Dana Bencana.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/4834/pp-no-22-tahun-2008>

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sosial. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41782/perpres-no-46-tahun-2015>

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018>

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999>
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999>
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>
- Republik Indonesia Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004>
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40511/uu-no-16-tahun-2004>
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- Rifai Achmad. 2020. “*Menggapai Keadilam dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan)*”. Makassar: CV. Nas Media Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=-jsLEAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Rosiana Dezonda. 2020. “Putusan Tata Usaha Negara yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Tidak Dipatudi oleh Pejabat Tata Usaha Negara”. *Jurnal Saniri*. Volume 1, Nomor 1, November 2020. hlm. 10
- Rusyadi. I. “Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana”. *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 5. No. 2. Tahun 2016. <https://media.neliti.com/media/publications/81115-ID-kekuatan-alat-bukti-dalam-persidangan-pe.pdf>
- Simanjuntak Freddy, et al. “Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Hukum Positif Indonesia”. *Journal of Law*, 3 (2) Oktober 2020. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/3950/pdf>
- Solihah Ratna dan Triono. “Peran KPK dalam Mengawal Pengalokasian Dana Bantuan Sosial di Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam* 16 (2) 2020 69-80. Vol. 16. No. 2. Juli – Desember 2020.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/7764/4190>

- Sofyan Andi dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena
- Soerjowinoto Petrus. 2020. *Metode Penulisan Karya Hukum*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata
- Sukino. "Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial (Studi Putusan MA.No. 995 K/PID.SUS/2017)". *Ensiklopedia of Journal*. Vol 1. No. 4. Edisi 1 Juli 2019. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/149/176>
- Susanti Rambu. 2019. "Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan". *Jurnal Akrab Juara*. Volume 4. Nomor 2. Edisi Mei 2019. <https://123dok.com/document/qmj99o45-pertimbangan-tujuan-pelaku-tindak-pidana-penjatuhan-putusan-pengadilan.html>
- Suyanto. H. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara
- Wantu Fence. 2021. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 12. No. 3. September 2021. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/121/68>
- Yanuar Tofik. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha